

MONITORING & EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu
Kalimantan Barat, 78716, Telepon (0567) 21003
Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>
Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

NOTULEN RAPAT

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Rapat : Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Juli 2025
Surat Undangan : 700.1.2.7/2361/SETDA/PERKEU Tanggal 24 Juli 2025
Waktu Rapat : 08:30 WIB – selesai
Acara : Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Pimpinan Rapat : Muhammad Nazaruddin, S.K.M., M.PH.
Ketua : Teodolus Teddy Hinggaan, S.T.
Sekretaris : Nicolaus Purwanto, S.IP
Pencatat : Vilaria Laudra Aprilianti, S.E
Peserta Rapat : Daftar Terlampir

Kegiatan Rapat

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2025. Membahas realisasi capaian kinerja yang telah dilakukan untuk tiap program, sub kegiatan dan kesesuaian antara target dan realisasi yang dicapai disesuaikan dengan target dan waktu pelaksanaan kegiatan. Plt. Asisten Administrasi Umum menyampaikan ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai ditandai dengan warna kuning pada tabel dan yang melebihi target ditandai dengan warna merah. Plt. Asisten Administrasi Umum menyampaikan agar setiap bagian menyajikan data, jika tidak tercapai apa kendalanya dan langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan tersebut dan apa solusinya dan harus disertai dengan data dukung yang valid.

2. IKU Sekretaris Daerah

Hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
SEKRETARIAT DAERAH					RATA-RATA				43,19	RATA-RATA TOTAL		18,70	105.785.272.000	38.424.148.306	36,32	6,87	-		
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%	0	67	0	0	66,7	70,18	lawXV11E20	82,97	100	66,67	54.692.822.429	21.300.236.567	38,95	32,33	Sekretaris Daerah
Sasaran 1.ind2		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%	44	25	0	0	68,75	72,37	lawXV11E20	100	95	72,37					
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	0	5	0	0	5,3	5,26	lawXV11E20	0	100	5,26	1.582.640.800	499.884.825	31,59	-26,32	Sekretaris Daerah
Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	61	Nilai	B	B	0	0	60,4	99,02	lawR11HSetda	60,4	79	76,46					
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	10	0	0	0	9,8	9,76	lawXV11E20	0	100	57,14	49.509.808.771	16.624.026.914	33,58	20,81	Sekretaris Daerah
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	84	Nilai	0	0	0	0	0,0	0,00	-	87,78	88	0,00	0	0	-	-	Perkeu

A. Predikat SAKIP

Nilai SAKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2023 sudah dikeluarkan oleh pihak Inspektorat sehingga mendapat Nilai B dan ini memang pencapaian yang masih rendah/kurang sehingga memang harus di tingkatkan lagi karena target pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebenarnya adalah BB bukan B.

B. LPPD

Bahwa penilaian terhadap LPPD tidak setiap tahun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri sehingga apabila tetap menggunakan indikator tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan rendahnya capaian terkait indikator tersebut. Penilaian terhadap LPPD terakhir dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 21 April 2025 dengan nilai 2,8143.

C. IKM

Terkait nilai IKM yang nilainya masih kosong dikarenakan hasil IKM tahun 2025 belum keluar karena pengukurannya dilakukan persemester.

3. Paparan Asisten Administrasi Umum

Hasil pengukuran kinerja dari Asisten Administrasi Umum sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Reali sasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Target Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.01	Meningkatnya kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	41	Dok	4	0	0	0	4,0	9,76	sayXV35Z	0	151	2,65	49.509.808.771	16.624.026.914	33,58	-23,82	Asistem Adum

Plt. Asisten Administrasi Umum memaparkan, pada triwulan II bagian-bagian yang capaian masih rendah agar memperhatikan progress kegiatan masing- masing. Salah satu hal yang dilakukan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan diawal tahun berjalan dan diharapkan agar bagian-bagian lebih memperhatikan daya serap realisasi. Asisten Administrasi Umum berharap untuk selalu tetap mempertahankan kinerja yang terbaik dan memenuhi bukti dukung karena bukti dukung adalah sesuatu yang sangat penting yang merupakan ukuran dalam akuntabel tidaknya sebuah kinerja. Untuk *output* dan *outcome* yang masih belum tercapai sesuai dengan target, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya banyak direalisasikan pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II ini masih belum terpenuhi.

4. Paparan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Hasil pengukuran kinerja dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Reali sasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Target Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.02	Meningkatnya kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	Kbjkn	7	6	0	0	13,0	68,42	sayXV3E7L	0	95	13,68	54.692.822.429	21.300.236.567	38,95	29,48	Asistem Pem Kesra

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memaparkan, dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga akhir triwulan II dari *output* dan *outcome* masih belum tercapai sesuai dengan target, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya banyak direalisasikan pada triwulan III, sehingga target

pada triwulan pertama ini masih belum terpenuhi, maka dari itu diperlukan percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan berfokus pada pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dengan target yang telah ditentukan.

5. Paparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Hasil pengukuran kinerja dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr1	Tr2	Tr3	Tr4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.03	Meningkatnya kualitas kebijakan Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	Dok	0	1	0	0	1,0	5,26	sayXVr3Ez	0	95	1,05	1.582.640.800	499.884.825	31,59	-26,32	Asisten Ekbang

Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan, masing-masing bagian bisa mulai mengidentifikasi kelemahan pada setiap kegiatan yang belum tercapai pada triwulan II dan mengevaluasi agar capaian kinerja dan realisasi anggaran pada triwulan III nanti dapat tercapai sesuai dengan target. Asisten Perekonomian dan Pembangunan memaparkan untuk *output* dan *outcome* yang realisasinya belum tercapai pada triwulan II karena realisasinya pada triwulan berikutnya.

6. Bagian Umum

Hasil pengukuran kinerja Bagian Umum sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

4.01.01.2.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	100	0	0	0	100,0	105,26	sayXVr3Ez	100	95	105,26	507.465.400	173.675.200	34,22	71,04	Umum
01.2.03.0001	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	AzjnWwtdby	1	5	20,00	20.880.000	5.855.000	28,04	71,96	Umum
01.2.03.0002	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	qzwWm1Qv	1	5	20,00	14.600.000	2.479.000	16,98	83,02	Umum
01.2.03.0003	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	98.698.300	6.035.500	6,12	93,88	Umum
01.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	22.975.000	8.700.000	37,87	62,13	Umum
01.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	350.312.100	150.605.700	42,99	57,01	Umum
4.01.01.2.04	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	90	%	81	0	0	0	80,8	89,76	Tidak Ada	0	90	89,76	2.603.308.589	1.536.379.544	59,02	30,74	Umum
01.2.05.0001	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	Tidak Ada	12	60	10,00	120.400.000	36.000.000	29,90	20,10	Umum
01.2.05.0002	Terseledinya Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	0	0,00	0,00	-	1	5	0,00	150.000.000	0	0,00	0,00	Umum
01.2.05.0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Bln	3	3	0	0	6,0	50,00	Tidak Ada	12	60	10,00	2.159.551.589	1.500.379.544	69,48	-19,48	Umum
01.2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bln	0	0	0	0	0,00	0,00	-	0	60	0,00	56.165.000	0	0,00	0,00	Umum
01.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Bln	0	0	0	0	0,00	0,00	-	0	60	0,00	14.520.000	0	0,00	0,00	Umum

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%			
Y1.2.05.0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	0	0	0	0	0,0	0,00	-	10	50	0,00	102.672.000	0	0,00	0,00	Umum	
4.01.01.2.06	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	100	0,00	11.765.962.780	2.536.560.405	21,56	-21,56	Umum	
Y1.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	1	0	0	1,0	100,00	K_WDRVx	1	5	20,00	4.225.096.350	0	0,00	100,00	Umum	
Y1.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	194.337.500	0	0,00	0,00	Umum	
Y1.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	211.014.000	0	0,00	0,00	Umum	
Y1.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1,3	5	0,00	137.530.000	0	0,00	0,00	Umum	
Y1.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1,13	5	0,00	133.011.180	0	0,00	0,00	Umum	
Y1.2.06.0008	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	kunjunga	2	5	0	0	7,0	23,33	7InidHR3na	30	150	4,67	1.619.138.000	779.875.000	48,17	-24,83	Umum	
Y1.2.06.0009	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	Laporan	4	6	0	0	10,0	0,67	nP_Zow8y	0	7500	0,13	5.074.145.750	1.727.643.405	34,05	-33,38	Umum	
Y1.2.06.0010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	171.690.000	29.042.000	16,92	83,08	Umum	
4.01.01.2.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	100	0,00	3.559.424.000	0	0,00	0,00	Umum	
Y1.2.07.0002	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	19	0,00	3.320.010.000	0	0,00	0,00	Umum	
Y1.2.07.0005	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	0	0	0	0	0,0	0,00	-	650	3250	0,00	239.414.000	0	0,00	0,00	Umum	
4.01.01.2.08	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	100	0,00	3.665.441.000	1.105.986.339	30,17	-30,17	Umum	
Y1.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	BD8yqhtVQ	0	20224	0,03	44.714.000	18.120.000	40,52	9,48	Umum	
Y1.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	aK0lwZuvsC	0	60	10,00	1.505.000.000	633.918.200	42,12	7,88	Umum	
Y1.2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	0	5	0	0	5,0	41,67	K02PHml_u	0	36	13,89	794.515.000	289.300.000	36,41	5,25	Umum	
Y1.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	0	3	0	0	3,0	25,00	YhwPWlWU	0	60	5,00	1.321.212.000	164.648.139	12,46	12,54	Umum	
4.01.01.2.09	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	100	0,00	1.840.994.945	216.492.874	11,76	-11,76	Umum	
Y1.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	3	0	0	0	3,0	8,82	4yFDzchbja	34	191	1,57	881.544.945	30.654.460	3,48	5,35	UMUM	
Y1.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	3	2	0	0	5,0	45,45	MAnPoc-Bc	11	55	9,09	584.200.000	164.684.700	28,19	17,26	UMUM	
Y1.2.09.0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0	1	0	0	1,0	50,00	-	2	10	10,00	375.250.000	21.153.714	5,64	44,36	UMUM	
4.01.01.2.11	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	100	%	25	25	0	0	50,0	50,00	-	0	100	50,00	950.447.000	352.517.698	37,09	12,91	UMUM	
Y1.2.11.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	xPDC7MY	0	60	10,00	480.231.000	152.537.698	31,76	18,24	UMUM	
Y1.2.11.0003	Terlaksananya kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Layanan	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	30	0,00	66.500.000	0	0,00	0,00	UMUM	
Y1.2.11.0004	Tersedianya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDHWKDH	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	DCIqKak6zI	0	20	30,00	403.716.000	199.980.000	49,53	0,47	UMUM	

Kinerja Bagian Umum sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Bagian Umum memaparkan bahwa dengan memperhatikan realisasi kegiatan/sub kegiatan seperti tersebut diatas, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya masih nol (belum direalisasikan), hal ini disebabkan karena penjadwalan realisasi anggarannya ditargetkan pada triwulan berikutnya. Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan Triwulan Ke-II Target Kinerja belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan *General chek up* dilakukan sesuai kebutuhan Kepala Daerah. Terkait tabel diatas yang masih berwarna kuning ada beberapa dokumen yang sedianya di upload masih dalam proses, terutama yang menyangkut sub kegiatan arsip dinamis, masih beberapa yang harus dilakukan evaluasi secara internal di bagian umum. Terkait dengan kearsipan akan melaksanakan rapat Tim dan pemusnahan baru terbit 1 (satu) dokumen dan baru akan bisa di upload setelah laporan disahkan oleh bapak

Sekretaris Daerah. Untuk yang masih berwarna merah evidence belum bisa diselesaikan, evidencenya selesai di akhir tahun karena ada beberapa laporan yang dilaksanakan dari Januari dan akan diinput dalam satu dokumen, setelah dilaksanakan baru bisa di upload karena perencanaanya dalam satu tahun baru bisa terbit satu dokumen. Terkait tabel yang masih berwarna kuning dan merah akan melakukan evaluasi secara internal dan akan segera ditindaklanjuti.

7. Paparan dari Kepala Bagian Organisasi

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Organisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr1	Tr2	Tr3	Tr4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.01.2.13	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	2	PD	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	3	0,00	595.519.000	138.036.574	23,18	23,09	ORGANISASI
01.2.13.ind2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	1	0,00					ORGANISASI
01.2.13.ind3		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	10	PD	6	6	0	0	12,0	120,00	DRJoJK7G	7	50	24,00					ORGANISASI
01.2.13.ind4		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8	PD	6	6	0	0	6,0	75,00	UL_8QaBr3a	6	8	75,00					ORGANISASI
01.2.13.ind5		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	22	PD	0	8	0	0	8,0	36,36	9XNIgfzcn	20	26	30,77					ORGANISASI
01.2.13.0001	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	1	Dok	0	0	0	0,0	0,00	tcqB_LNqLU	0	1	0,00	ORGANISASI					
03.0001.ind2		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan	50	PD	10	7	0	0	17,0	34,00	T_Pipxx6z2	0	50	34,00	ORGANISASI				
01.2.13.0002	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	27	PD	6	6	0	0	6,0	22,22	Ju67R73lar	0	50	12,00	189.909.500	46.497.195	24,48	16,63	ORGANISASI
03.0002.ind2		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	10	PD	6	6	0	0	6,0	60,00	oO0HuF3EU	0	50	12,00	ORGANISASI				
01.2.13.0003	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	PD	15	10	0	0	25,0	50,00	nXoDwzRIP	0	50	50,00	205.350.000	63.546.979	30,95	31,55	ORGANISASI
03.0003.ind2		Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	8	PD	6	6	0	0	6,0	75,00	MQns48G2	0	8	75,00	ORGANISASI				

Kinerja Bagian Organisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Bagian Organisasi menyampaikan, untuk Tim Kerja bidang kelembagaan dan Anjab dimana di dalam laporan memang realisasinya masih nol, perlu disampaikan untuk proses aktivitasnya sendiri sudah dilakukan sejak Januari terutama untuk bidang kelembagaan yang berkaitan dengan produk hukum dalam hal ini Perda dan Perbup. Untuk Perda terkait Pembentukan dan susunan PD kami dapat informasi dari Bagian Hukum bahwa untuk penetapannya sudah selesai tinggal menunggu untuk tanggal penetapan. Untuk penetapan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perbup. Terkait dengan Anjab untuk aktivitas yang sudah dilakukan pada TW kedua adalah melakukan pendampingan terhadap beberapa perangkat daerah dan target pada bulan Agustus ini adalah penyusunan pada hasil Anjab tersebut. Namun informasi dari Kemenpan bahwa telah terbit aturan baru berkaitan dengan nomenklatur jabatan pelaksana sehingga berdampak pada penyusunan yang telah

dilakukan. Intinya di Tim kami masih berproses terutama yang berkaitan dengan produk kebijakan.

Progress kinerja secara keseluruhan bahwa disasaran kinerja kepala bagian organisasi ada lima, jadi yang menjadi Tusi utama yang menjadi indikator yaitu kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Kemudian jumlah dokumen pelaksanaan hasil analisis jabatan, jumlah perangkat daerah yang menetapkan standar pelayanan publik dan jumlah Perangkat Daerah yang menyalurkan Reformasi Birokrasi serta beberapa perangkat daerah dengan nilai AKIP B sesuai dengan hasil evaluasi dari Inspektorat. Jadi beberapa indikator ini di bagian organisasi terbaca progressnya itu baru 2 (dua), kenapa di jumlah kelembagaan yang tepat Tusi dan tepat fungsi yaitu penyesuaian struktur organisasi Bapedda dengan Kominfo sedang di proses dan sedang diidentifikasi dan sedang dikaji oleh Bagian Organisasi sehingga nanti produk akhirnya adalah Peraturan Bupati yang setelah semua proses terlaksana tentunya adalah produk hukum, kita tidak bisa menentukan apakah terbit di TW III atau TW IV dan akan di dorong lebih cepat maka akan semakin lebih baik. Kemudia terkait dengan jumlah dokumen hasil analisis jabatan tentunya jumlah kebijakan dan progress sampai pada hari ini Bagian Organisasi sudah melakukan asistensi ke semua perangkat daerah dan sudah beberapa perangkat daerah yang di asistensi baru nanti di putuskan dalam Keputusan Bupati. Jadi memang sampai saat ini masih berproses.

8. Paparan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.01.2.14	Meningkatnya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	81	%	27	18	0	0	45,5	56,12	HtkASoQA	0	86	52,85	5.906.461.496	3.077.624.005	52,11	19,78	PROKOPIM
01.2.14.ind2		Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	82	%	41	45	0	0	85,9	104,73	BIP9s No3	0	85	101,04					PROKOPIM
01.2.14.ind3		Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	86	%	23	24	0	0	47,1	54,80	3zr7ptXP88	0	90	52,36					PROKOPIM
01.2.14.0001	Tertaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110	Lyn	30	20	0	0	50,0	45,45	HtkASoQA	1	576	8,68	2.544.602.000	1.764.035.718	69,32	-23,87	PROKOPIM
01.2.14.0002	Tertaksananya Fasilitasi Komunikasi	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	85	Lyn	35	38	0	0	73,0	85,88	BIP9s No3k	1	448	16,29	1.629.416.000	664.083.287	40,76	45,13	PROKOPIM
01.2.14.0003	Tertaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	87	Lyn	20	21	0	0	41,0	47,13	3zr7p0XP88y	1	436	9,40	1.732.443.496	649.505.000	37,49	9,64	PROKOPIM

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Protokol dan Komunikasi Pimpinan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memaparkan, pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdapat 1 sasaran dan 3 indikator. Pada TW II ini berjalan dengan baik dan sudah sesuai target disertai dengan bukti dukung. Kendala pada TW I yaitu untuk tabel yang berwarna kuning bukti dukung tidak di upload, dan pada TW II ini sudah diupload dan sudah di perbaiki.

9. Bagian Tata Pemerintahan

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab	
					Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4				Target 2024	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%			
4.01.02.2.01	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penguatan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	68	%	0	1	0	0	1,4	2,04	NFeer 123	0	72	1,93					TAPEM
02.2.01.Ind2		Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	90	0,00	540.318.500	236.458.250	43,76	-9,75	TAPEM
02.2.01.Ind3	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100	%	100	0	0	0	100,0	100,00	W01cx9z9	0	100	100,00					TAPEM
02.2.01.0001	Terfasilitasinya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	5	0,00	139.892.500	17.893.000	12,79	-12,79	TAPEM
02.2.01.0002	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	138.997.000	18.640.000	13,41	-13,41	TAPEM
02.2.01.0003	Terfasilitasinya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	Dok	1	1	0	0	2,0	100,00	uznZM hNk	1	10	20,00	261.429.000	199.925.250	76,47	23,53	TAPEM
4.01.02.2.04	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100	%	0	43	0	0	42,9	42,86	YMOQ 7h	91,3	100	42,86	133.728.000	41.802.600	31,26	11,60	TAPEM
02.2.04.0001	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7	Dok	0	3	0	0	3,0	42,86	YMOQ 7h	0	41	7,32	133.728.000	41.802.600	31,26	11,60	TAPEM

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Tata Pemerintahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyampaikan, untuk kinerja di Bagian Pemerintahan ini sudah berjalan, untuk Batas Wilayah sebenarnya sudah di proses dari TW I sampai TW II ini sudah di proses sudah di fasilitasi dan 2 kali juga sudah survey lapangan dan mengagendakan untuk penyusunan Berita Acara Putussibau Kota dengan Mendalam mudah-mudahan dalam beberapa minggu kedepan nanti menjadi dasar untuk melanjutkan. Untuk sementara ini yang diajukan sudah 2 (dua) naik ke bagian hukum yaitu kecamatan Bika dan kecamatan Pengkadan. Untuk tahun ini kami yakin batas akan tercapai mudah-mudahan yang di Kelurahan Kedamin Hulu nanti bisa selesai. Untuk kegiatan Rupabumi baru bisa diagendakan di semester

kedua dimulai dari TW III biasanya dimulai bulan Agustus, September, Oktober. Bagian Tata Pemerintahan juga sudah beberapa kali rapat dengan Provinsi kemudian juga sudah melakukan administrasi untuk dilakukan pengolahan. Ini adalah hasil dari pengolahan yang di sistem aplikasi SINAR, mungkin sekitar bulan Agustus atau bulan September sudah berjalan dan akan mengunjungi kecamatan. LPPD sudah selesai minggu lalu dan juga ada rapat evaluasi di Provinsi evaluasi nasional hampir semua OPD dan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman berdasarkan Permendagri dan sudah terpenuhi. Kerjasama Daerah sudah masuk di Bagian Pemerintahan ada 4 (empat) sudah dilakukan fasilitasi, sudah di proses dan dua diantaranya yaitu STKIP Sintang dan RS Soedarso masih menunggu kesepakatan lebih lanjut masih dalam koordinasi.

10. Paparan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.02.2.02	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	12	Kebijaka	7	4	0	0	11,0	91,67	/u9H1G 6m	0	60	18,33					KESRA
02.2.02.Ind2		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	2	Kebijaka	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	10	0,00	53.625.161.659	20.874.656.733	38,93	-8,37	KESRA
02.2.02.Ind3		Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	2	Kebijaka	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	10	0,00					KESRA
02.2.02.0001	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	Lap	0	1	0	0	1,0	16,67	/Ulvzdcym2	325	30	3,33	53.234.886.659	20.740.405.533	38,96	-22,29	KESRA
02.2.02.0002	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	Lap	0	1	0	0	1,0	50,00	/KJ0Y2WZ	101	10	10,00	207.518.000	77.950.600	37,56	12,44	KESRA
02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Kebijakan dari Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TransbumLimmas	2	Lap	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	10	0,00	182.757.000	56.300.600	30,81	-30,81	KESRA

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan, Jumlah kebijakan strategi di bidang Kesejahteraan Rakyat 17(tujuh belas) target disesuaikan dengan jumlah SK ada 17 (tujuh belas) target. untuk Bina Mental Spiritual ada 16 (enam belas) target kebijakan/rumusan. Untuk kebijakan di Kesejahteraan Masyarakat ini mulai dari kegiatan kedokteran, SK Tim Seleksi, SK Tim Sekretariat dan SK SALUT kemudian yang kedua bantuan hibah kepada PDD Polnep berupa bentuk laporan akan di buat evidence berupa laporan. Kegiatan fasilitasi di bidang Bina Mental Spiritual yaitu

kegiatan rapat lintas sektoral dalam bentuk laporan, fasilitasi kegiatan haji ada 3(tiga) SK yaitu SK Petugas Haji, SK nama-nama Kuota Jamaah Haji dan SK Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Fokus pada tabel yang berwarna kuning atau yang belum mencapai target yaitu Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat target masing-masing 2 (dua) target sampai TW II kebijakan baru 1 (satu) yang terealisasi. Selanjutnya yang Bina Mental Sampai triwulan 2 (dua) sudah 1 (satu) kebijakan. Kendala Kesejahteraan Sosial masih kuning karena SK belum selesai, biasanya di akhir tahun sekitar bulan Desember baru bisa dibuat laporan. SK tentang Bantuan Hibah tak terduga/bantuan berobat, mengapa akhir bulan karena yang mengajukan tidak sama, jadi pas akhir tahun baru di rekap. Setelah daftar lengkap baru di buat SK. Sedangkan untuk kebijakan Bina Mental Spiritual ada 6 (enam). Beasiswa kedokteran, Tim seleksi kedokteran, Tim Sekretariat tahap 1 (satu) belum selesai sehingga belum bisa membuat laporan. Produk final di bulan Desember.

11. Paparan Kepala Bagian Hukum

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Hukum sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Ranstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.02.2.03	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	82	%	27	27	0	0	54,0	65,85	lers/1K5YL	82,125	90	60,00	393.614.270	147.318.984	37,43	43,28	HUKUM
02.2.03.ind2		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	77	%	46	0	0	0	46,2	59,94	lers/1K5YL	86,67	90	51,28					
02.2.03.ind3		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	70	%	16	66	0	0	81,4	116,33	lers/1K5YL	50	90	90,48					
02.2.03.0001	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450	Dok	147	150	0	0	297,0	66,00	lers/1K5YLE	618	3230	9,20	177.329.170	76.293.184	43,02	22,98	HUKUM
02.2.03.0002	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	13	Kasus	6	0	0	0	6,0	46,15	lers/1K5YLE	10	53	11,32	120.010.000	44.900.800	37,41	8,74	HUKUM
02.2.03.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70	produk HI	11	46	0	0	57,0	81,43	lers/1K5YLE	21	146	39,04	96.275.100	26.125.000	27,14	54,29	HUKUM

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Hukum sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Bagian Hukum menyampaikan terkait dengan sasaran Bagian Hukum indikator Persentase Penyelesaian Proses Penyusunan Produk Hukum target 82% TW 1 terealisasi 27 (dua puluh tujuh) target, TW II terealisasi 27 (dua puluh tujuh) target, total realisasi sementara 54 (lima puluh empat), Fasilitasi Bantuan Hukum target 77 % pada TW I terealisasi 46 (empat puluh enam) dan TW II nol, masih nol

karena terkait dengan laporan atau kegiatan litigasi dan non litigasi yang dimasukkan ke Bagian Hukum untuk TW II memang tidak ada. Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan target 70% untuk TW 1 target terealisasi 16 (enam belas) TW II terealisasi 66 (enam puluh enam) target.

12. Paparan Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Reali sasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr1	Tr2	Tr3	Tr4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.03.2.01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan dibidang Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	100	0,00	248.371.000	101.618.725	40,91	-40,91	EKBANG SDA
03.2.01.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dok	0	1	0	0	1,0	50,00	JmWVnXKf	4	10	10,00	81.133.500	25.094.125	30,93	19,07	EKBANG SDA
03.2.01.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Lap	0	1	0	0	1,0	50,00	aZ6i4tCH7a	0	10	10,00	74.841.000	31.368.200	41,91	8,09	EKBANG SDA
03.2.01.0003	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	29.912.000	14.338.700	47,94	-47,94	EKBANG SDA
03.2.01.0004	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	29.492.500	15.747.600	53,40	-53,40	EKBANG SDA
03.2.01.0005	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	5	0,00	32.992.000	15.070.100	45,68	-45,68	EKBANG SDA
4.01.03.2.02	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	100	0,00	115.564.300	40.799.800	35,30	-35,30	EKBANG SDA
03.2.02.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	4	5	0,00	29.173.500	9.486.200	32,52	-32,52	EKBANG SDA
03.2.02.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Lap	0	0	0	0	0,0	0,00	-	4	5	0,00	32.957.000	12.908.400	39,17	-39,17	EKBANG SDA
03.2.02.0003	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	Lap	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	5	0,00	53.433.800	18.405.200	34,44	-34,44	EKBANG SDA
4.01.03.2.04	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	100	0,00	84.648.600	46.844.100	55,34	-55,34	EKBANG SDA
03.2.04.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	29.492.000	14.604.800	49,52	-49,52	EKBANG SDA
03.2.04.0002	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	29.491.800	15.842.800	53,72	-53,72	EKBANG SDA
03.2.04.0003	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	25.664.800	16.396.500	63,89	-63,89	EKBANG SDA

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA menyampaikan, dari 11 (sebelas) Sub Kegiatan ada 2 (dua) yang sesuai dan ada 9 (sembilan) yang belum sesuai. Pada prinsipnya terkait dengan kinerja pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA pada prinsipnya tidak ada masalah dan sudah sesuai. Pada saat rapat TW I ada perubahan target dan satuan dari ukuran kinerja. Ada beberapa sub kegiatan yang di 9 (sembilan) kegiatan ada 1 (satu) laporan dan 1 (satu) dokumen sehingga apabila kita lihat dalam triwulan pasti di hasilnya nol yang pasti tidak sesuai. Nanti akan dilakukan evaluasi kinerja internal di Bagian

Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA, ini yang harus kita sepakati. Yang sudah sesuai misalnya Pengendalian dan Pendistribusian Perekonomian ada 2 (dua) laporan target adalah 2 (dua) evidencinya 2 (dua) laporan yaitu laporan yang memang tiap triwulan dilaporkan terkait inflansi dan percepatan akses keuangan daerah. Berkaitan dengan salah satu sub kegiatan di SDA yaitu 1 (satu) dokumen. Terkait dengan pertambangan dan lingkungan hidup 1 (satu) dokumen bukan berarti tidak melakukan kinerja kami terus memfasilitasi, begitu di tampilkan dalam pengukuran kinerja pasti tidak sesuai sedangkan endingnya dokumen pelaksana kebijakan. Di bagian perekonomian pada prinsipnya untuk kinerja atau pekerjaan yang kami lakukan prinsipnya tidak ada masalah sudah berjalan sesuai dengan yang sudah dikerjakan.

13. Paparan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Reali sasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.03.2.03	Meningkatnya kualitas layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100	%	19	22	0	0	40,5	40,54	BaPuQGhPI	0	100	40,54	1.134.056.900	310.622.200	27,39	55,74	PBJ
03.2.03.ind2		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	70	guna La	0	88	0	0	88,0	125,71	YkmfQKop6	50	400	22,00					
03.2.03.0001	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	74	Dok	0	16	0	0	16,0	21,62	BaPuQGhPI	544	364	4,40	732.093.000	221.666.000	30,28	-8,66	PBJ
03.2.03.0002	Terkelolanya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	70	guna La	55	88	0	0	88,0	125,71	YkmfQKop6	78	400	22,00	252.302.200	32.521.000	12,89	112,82	PBJ
03.2.03.0003	Tertaksananya Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	Orang	15	20	0	0	35,0	70,00	UZvYaf7Y	0	340	10,29	149.661.700	56.435.200	37,71	32,29	PBJ

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan, secara umum untuk bagian PBJ sudah memenuhi kinerja. Salah satu sub kegiatan yang tidak tercapai yaitu pada sub Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa target 74 (tujuh puluh empat) dokumen sampai dengan TW II 16 (enam belas) dokumen yang terealisasi ini sebenarnya ada 18 (delapan belas) paket tender, karena masing-masing tender 1 (satu) dokumen dari mulai review, Berita Acara penjelasan tender sampai evaluasi sampai berita acara hasil tender. Dari 18 (delapan belas) paket 16 (enam belas) yang

selesai 2 (dua) paket yang belum selesai, 1 (satu) masih dalam proses dan satu dibatal. jika melihat target yang 74 (tujuh puluh empat) masih belum mencapai target dan masih dibawah dampaknya dari efisiensi DAK, jadi paket untuk tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Solusinya adalah dengan merubah target dan disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan agar terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

14. Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil paparan diatas maka dibuat matriks rencana aksi tindak lanjut sebagai berikut;

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Realisasi
1	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	-	
2	Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	keterbatasan waktu dan keterbatasan personil	diagendakan di bulan agustus, september, oktober. menambahkan utk tahun sebelumnya
3	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	terdapat 17 Kebijakan	perbaikan terhadap target kinerja
4	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	terdapat 8 kebijakan, tahapan 1 belum terselesaikan	perbaikan terhadap target kinerja
5	Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	hanya 1 sk, saja. biasanya di ajukan pada akhir tahun	revisi target
6	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dampak DAK efiseinsi sehingga tidak tercapai 74 dok	akan terealisasi 18 dok saja smpai akhir tahun, Revisi target
7	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	terlewatkan terisi utuk triwulan I	akan disii menjadi 14 pda tr 1

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Realisasi
8	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabag tidak dapat hadir saat rapat krn ada kegiatan di DPRD, staf terkait yg memahami juga tidak hadir, yg mnghadiri bukan org yg trlibat langsung dalam SAKIP	akan melakukan rapat internal dan hasilnya akan disampaikan kepada Bagian Perkeu
9	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	sedang dalam proses penetapan perbup penyusunan SOTK	
10	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	telah melakukan pendampingan, terdampak terkait regulasi baru kepmenpan	agustus akan melakukan penetapan anjab
11	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	Pada Bagian Prokopim tidak terdapat penyusunan produk kebijakan	Mengidentifikasi ketersediaan penyusunan produk hukum, jika tidak teridentifikasi maka indikator akan dihapus
12	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi		terus mendorong setiap OPD agar akipnya B
13	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Hukum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	pada bagian hukum tidak ada produk hukum, yg mengisi asisten Pem Kes (sama seperti prokopim)	tidak di tampilkan atau indikator dihapus
14	Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Terkaiaat Tekon sudah dirumahkan, sehingga penurunan realisasi	memberdayakan staf yang ada
15	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	DPA Pergeseran tidak termasuk DPA Perubahan	melakukan perubahan target terhadap DPA Perubahan menjadi 1 target

15. Tindak Lanjut terhadap Hasil Evaluasi pada LKjIP 2023

Berikut ini adalah tabel permasalahan pada tahun 2023:

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi	Status Progres
1	Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP	- Melakukan pendampingan terhadap bagian - Jemput Bola Data yang diperlukan - Melakukan rapat Monev setiap triwulan	- Sudah membentuk tim SAKIP dengan SK Sekda - Membuat Grup WA SAKIP - Penginputan data oleh masing-masing bagian melalui aplikasi spreadsheet - Rapat monev sudah pada hari ini	Selesai
2	Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah pada awal tahun	Menyusun Renaksi Kinerja pada Triwulan II	Renaksi sudah disusun: Link	Selesai
3	Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara berkala	Reviu Renstra sebaiknya untuk Renstra baru saja	Penyusunan Draf Renstra Baru: - Link - Link	Selesai
4	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran	Pengadaan Laptop untuk setiap staf pada Tim SAKIP Triwulan II	Sudah mendapat laptop semua	Selesai

16. Matriks Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan sebelumnya (Triwulan I)

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Realisasi
1	Tidak adanya bukti evidence pada bagian Kesra, karena memang SK dalam proses pembuatan	Membuat dan mengupload bukti dukung	SK sudah dibuat dan masih dalam proses karena produk final sekitar bulan Desember
2	Hibah tidak bisa menjadi target pada Kesra	Tidak menggunakan jumlah hibah, tetapi menggunakan indikator lainnya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2	Target utk pengendalian dan distribusi akan diubah menjadi 1 dok, berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 2024	menyesuaikan target pada Perjanjian Kinerja	
3	Seluruh Indikator berdasarkan hasil rapat tim target akan diubah menjadi 4 dokumen setiap triwulan.	menyesuaikan target dan indikator pada Perjanjian Kinerja	

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Realisasi
	melakukan koordinasi , evaluasi kebijakan		
4	Terdapat beberapa indikator yg tidak terakomodir dalam nomenklatur kegiatan	Menyesuaikan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan RENSTRA	
5	Dana DAK berdampak efisiensi	Menyesuaikan Target sesuai dengan Anggaran yg tersedia	belum disesuaikan
6	Beberapa OPD tidak/ belum melaksanakan Paket Tender		
7	permasalahan pelaksanaan akun terjadi tingkat layanan dari LPSE	Membuat Rekap, Dokumentasi dan absensi	sudah dilakukan dengan membuat Rekap, Dokumentasi dan absensi terhadap layanan LPSE
8	Perubahan e-Catalog v.5 ke v.6	ke UPBJ melakukan Bimtek	
9	terkait efisiensi sehingga utk UKPBJ akan dilakukan perubahan target	melakukan perubahan target dan indikator pada Perjanjian Kinerja dan Renstra	
10	Tidak ada bukti dukung	memberikan bukti dukung	
11	Target utk disiplin pegawai kegiatan senam yang diupload SPJ atau Foto senamnya	Upload laporan dengan menyertakan fotonya	
12	Ada perubahan terhadap indikator yang berubah setelah ada hasil evaluasi	melakukan perubahan indikator dan target pada Perjanjian Kinerja dan RENSTRA	Sudah Revisi PK dan RENSTRA
13	Untuk anjab itu menggunakan dokumen bukan PD	melakukan perubahan terkait target pada Perjanjian Kinerja dan RENSTRA	Sudah melakukan revisi
14	Perda sampai saat ini masih dalam tahap proses di provinsi	Menunggu proses penetapan perda pada provinsi	penetapannya sudah selesai tinggal menunggu untuk tanggal penetapan
15	Anjab yang sudah di verifikasi 54 PD, 27 PD Kabupaten, 23 PD Kecamatan dan 4 Kelurahan. yang mendekati format anjab	melakukan perubahan terhadap indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan RENSTRA	Sudah merevisi PK dan RENSTRA

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Realisasi
	baru 41 PD, yg sesuai isi baru 5 PD (Dinamika perubahan peraturan sangat cepat sekali, sehingga perlu selalu melakukan perbaikan berkala sesuai peraturan)		
16	berdasarkan hasil efisiensi akan mengalami penurunan target dan satuannya	Target disesuaikan dengan anggaran yang ada	Sudah melakukan Perubahan PK dan Renstra
17	Nilai LPPD dikeluarkan terakhir 2022	Laporan LPPD Kabupaten 1 dokumen	Indikator sudah menggunakan Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk pada PK Kabag
18	Kerjasama apakah evidence nya di masukkan semua atau tidak (kerjasama dan PKS)	dimasukkan kedua duanya	
19	Target terdapat yang 4,5 dokumen	menyessuaikan terhadap target yang 90%, agar tepat mendapat angka 5 kerjasama atau melakukan pembulatan	Membulatkan
20	Terdapat efisiensi anggaran, sehingga target produk hukum mengalami penurunan target	Menargetkan sebanyak 450 produk hukum yg disusun	Telah melakukan perubahan target
21	Beberapa Bagian belum melaksanakan rapat evaluasi pada masing-masing bagian secara triwulan	Seluruh bagian mengadakan rapat evaluasi masing-masing bagian	hanya Tapem dan Hukum yang sudah mengadakan rapat evaluasi

Sebagai tindaklanjuti dari rapat Monitoring Evaluasi Kinerja berdasarkan evaluasi capaian kinerja triwulan II diharapkan untuk setiap kegiatan pada triwulan berikutnya bisa dilaksanakan sesuai target dan rencana sehingga pencapaian realisasi kinerja bisa lebih baik dan meningkat.

Demikian Rapat Evaluasi ini dilakukan dan telah disepakati bersama untuk segera ditindaklanjuti.

Pimpinan Rapat,

Putussibau, 24 Juli 2025

Notulis



Muhammad Nazaruddin, S.K.M., M.PH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690827 200003 1 003

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Laudra Aprilianti'.

Vilaria Laudra Aprilianti, S.E








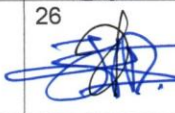
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : KAMIS, 24 JULI 2025
Pukul : 09:00 WIB S/D 11:20 WIB.
Tempat : KUANG RAPAT BUPATI KAPUAS HULU
Agenda : RAPAT MONITORING & EVALUASI KINERJA TRIWULAH 2
TAHUN 2025 SETDA KAB. KAPUAS HULU

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	MUHAMMAD HAZARUDDIN	PIL. ASISTEN ADM. UMUM	1	2
2	Nicolas Purnawanjo	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
3	YOVIANUS RIADY	Kabag Hukum	3	4
4	Budi Pratejito	Leady Ekspansi		
5	Celta.S	Analisis Kebijakan	5	6
6	ISFAHOMI	STAF KESRA		
7	Albando Deo P.	Staf Protokolin	7	8
8	Bonaventura Sihombing	Staf Protokolin		
9	Leonardus P. Pefito	At. Bas. tapem.	9	10
10	Isnaini. D-P	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
11	Sumiati	Penelaah Teknis Kebijakan	11	12
12	Yulyana libang	Analisis SOMA Pada Bagian umum		
13	Muesri	Staf PRG	13	14
14	Wahyudi	Kesubbeg Penyuluhan PRG		
15	BAHAKI NURDIN	STAF KESRA	15	16
16	Hurchikus Hlm	Panamy Per UCI		
17	M. Rahner	Perencana Ahli Pertama	17	18
18	Lusia Rospita R.	Penelaah Teknis Kelastan		
19	Albert Jozan Rizky Sturmadi	Pranata Komputer	19	20
20	Lily Petrianti	Penelaah teknis kebijakan		

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
21	Wulhidoyanto	Penelaah Teknis Kebijakan	21 	22 
22	Aditya Pratama .P	PBS - Ahli pertama		
23	Supriamus (ter)	Pengolah Data Informatika	23 	24 
24	Sinta Savitriani	Staff perencana		
25	Pransiska YSS	Penelaah Teknis kebijakan	25 	26 
26	Adrianus Iriwantoto	Perencana Ahli Pertama		
27			27	28
28				
29			29	30
30				
31			31	32
32				
33			33	34
34				
35			35	36
36				
37			37	38
38				
39			39	40
40				
41			41	42
42				
43			43	44
44				
45			45	46
46				

Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Nomor : 700.1.2.7/2361/SETDA/PERKEU Putussibau, 22 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Dokumen
Hal : Rapat Monitoring & Evaluasi Kinerja
Triwulan II Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir
di
Putussibau

Dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Triwulan II pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 24 Juli 2025
Waktu : 08.30 WIB-selesai
Tempat : Ruang Rapat Bupati
Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Adapun yang menjadi Bahan Evaluasi dapat dilihat pada Link: <https://bit.ly/Pengukuran-Kinerja-2025-SetdaKH> pada Triwulan II (terlampir). Diharapkan seluruh Kepala Bagian menyiapkan tanggapan berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut yang tidak mencapai target serta melebihi target yang ditandai dengan warna kuning dan warna merah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 700.1.2.7/2361/SETDA/PERKEU
Tanggal : 22 Juli 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
7. Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

**PENGUKURAN KINERJA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TRIWULAN II TAHUN 2025**

Sumber: <https://bit.ly/Pengukuran-Kinerja-2025-SetdaKH>

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target 2029	Kemajuan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4							Target	Realisasi s/d Juni	%		
SEKRETARIAT DAERAH					RATA-RATA				43,19	RATA-RATA/ TOTAL				18,70	105.785.272.000	38.424.148.306	36,32	6,87	-
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%	0	67	0	0	66,7	70,18	layXVr3EZ0	82,97	100	66,67	54.692.822.429	21.300.236.567	38,95	32,33	Sekretaris Daerah
Sasaran 1.ind2		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%	44	25	0	0	68,75	72,37	layXVr3EZ0	100	95	72,37					
4.01.02	Meningkatnya kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	Kbjkn	7	6	0	0	13,0	68,42	layXVr3EZ0	0	95	13,68	54.692.822.429	21.300.236.567	38,95	29,48	Asistem Pem Kesra
4.01.02.2.01	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	68	%	0	1	0	0	1,4	2,04	NFeer l27s	0	72	1,93	540.318.500	236.458.250	43,76	-9,75	TAPEM
02.2.01.ind2		Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	90	0,00					
02.2.01.ind3	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100	%	100	0	0	0	100,0	100,00	DrW0icx9Z9f	0	100	100,00					TAPEM
02.2.01.0001	Terfasilitasinya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	5	0,00	139.892.500	17.893.000	12,79	-12,79	TAPEM
02.2.01.0002	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	138.997.000	18.640.000	13,41	-13,41	TAPEM
02.2.01.0003	Terfasilitasinya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	Dok	1	1	0	0	2,0	100,00	uznZM_hNk	1	10	20,00	261.429.000	199.925.250	76,47	23,53	TAPEM
4.01.02.2.02	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	12	Kebijaka	7	4	0	0	11,0	91,67	Uu9H1G_6nv	0	60	18,33	53.625.161.659	20.874.656.733	38,93	-8,37	KESRA
02.2.02.ind2		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	2	Kebijaka	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	10	0,00					
02.2.02.ind3		Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	2	Kebijaka	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	10	0,00					
02.2.02.0001	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	Lap	0	1	0	0	1,0	16,67	JUvzdcvcmZ	325	30	3,33	53.234.886.659	20.740.405.533	38,96	-22,29	KESRA
02.2.02.0002	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	Lap	0	1	0	0	1,0	50,00	ArJDY2IWZ	101	10	10,00	207.518.000	77.950.600	37,56	12,44	KESRA
02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Kebijakan dari Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	2	Lap	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	10	0,00	182.757.000	56.300.600	30,81	-30,81	KESRA
4.01.02.2.03	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	82	%	27	27	0	0	54,0	65,85	ders/1K5YL	82,125	90	60,00	393.614.270	147.318.984	37,43	43,28	HUKUM
02.2.03.ind2		Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	77	%	46	0	0	0	46,2	59,94	ders/1K5YL	86,67	90	51,28					
02.2.03.ind3		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	70	%	16	66	0	0	81,4	116,33	ders/1K5YL	50	90	90,48					
02.2.03.0001	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450	Dok	147	150	0	0	297,0	66,00	ders/1K5YLE	618	3230	9,20	177.329.170	76.293.184	43,02	22,98	HUKUM
02.2.03.0002	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	13	Kasus	6	0	0	0	6,0	46,15	ders/1K5YLE	10	53	11,32	120.010.000	44.900.800	37,41	8,74	HUKUM
02.2.03.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70	Produk Hu	11	46	0	0	57,0	81,43	ders/1K5YLE	21	146	39,04	96.275.100	26.125.000	27,14	54,29	HUKUM

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Reali sasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.02.2.04	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100	%	0	43	0	0	42,9	42,86	YMQQ 7bf	91,3	100	42,86	133.728.000	41.802.600	31,26	11,60	TAPEM
02.2.04.0001	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7	Dok	0	3	0	0	3,0	42,86	YMQQ 7bfE	0	41	7,32	133.728.000	41.802.600	31,26	11,60	TAPEM
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	0	5	0	0	5,3	5,26	sayXVr3EZ0	0	100	5,26	1.582.640.800	499.884.825	31,59	-26,32	Sekretaris Daerah
4.01.03	Meningkatnya kualitas kebijakan Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	Dok	0	1	0	0	1,0	5,26	sayXVr3EZ	0	95	1,05	1.582.640.800	499.884.825	31,59	-26,32	Asisten Ekbang
4.01.03.2.01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan dibidang Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	100	0,00	248.371.000	101.618.725	40,91	-40,91	EKBANG SDA
03.2.01.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dok	0	1	0	0	1,0	50,00	JmWVnXrKf	4	10	10,00	81.133.500	25.094.125	30,93	19,07	EKBANG SDA
03.2.01.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Lap	0	1	0	0	1,0	50,00	nZ6i4fCH7g	0	10	10,00	74.841.000	31.368.200	41,91	8,09	EKBANG SDA
03.2.01.0003	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	29.912.000	14.338.700	47,94	-47,94	EKBANG SDA
03.2.01.0004	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	29.492.500	15.747.600	53,40	-53,40	EKBANG SDA
03.2.01.0005	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	5	0,00	32.992.000	15.070.100	45,68	-45,68	EKBANG SDA
4.01.03.2.02	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	100	0,00	115.564.300	40.799.800	35,30	-35,30	EKBANG SDA
03.2.02.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	4	5	0,00	29.173.500	9.486.200	32,52	-32,52	EKBANG SDA
03.2.02.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Lap	0	0	0	0	0,0	0,00	-	4	5	0,00	32.957.000	12.908.400	39,17	-39,17	EKBANG SDA
03.2.02.0003	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	Lap	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	5	0,00	53.433.800	18.405.200	34,44	-34,44	EKBANG SDA
4.01.03.2.03	Meningkatnya kualitas layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100	%	19	22	0	0	40,5	40,54	9aPuQGHPl	0	100	40,54	1.134.056.900	310.622.200	27,39	55,74	PBJ
03.2.03.ind2		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	70	guna La	0	88	0	0	88,0	125,71	/kmfQKgp6f	50	400	22,00					PBJ
03.2.03.0001	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	74	Dok	0	16	0	0	16,0	21,62	9aPuQGHPl	544	364	4,40	732.093.000	221.666.000	30,28	-8,66	PBJ
03.2.03.0002	Terkelolanya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	70	guna Lay	55	88	0	0	88,0	125,71	/kmfQKgp6f	78	400	22,00	252.302.200	32.521.000	12,89	112,82	PBJ
03.2.03.0003	Terlaksananya Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	Orang	15	20	0	0	35,0	70,00	nJZvYaf7Yf	0	340	10,29	149.661.700	56.435.200	37,71	32,29	PBJ
4.01.03.2.04	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	100	0,00	84.648.600	46.844.100	55,34	-55,34	EKBANG SDA
03.2.04.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	29.492.000	14.604.800	49,52	-49,52	EKBANG SDA
03.2.04.0002	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	29.491.800	15.842.800	53,72	-53,72	EKBANG SDA
03.2.04.0003	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	25.664.800	16.396.500	63,89	-63,89	EKBANG SDA
Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	61	Nilai	B	B	0	0	60,4	99,02	EwRMhSns	60,4	79	76,46					Sekretaris Daerah
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	10	0	0	0	9,8	9,76	ayXVr3EZ0	0	100	57,14	49.509.808.771	16.624.026.914	33,58	20,81	Sekretaris Daerah
4.01.01	Meningkatnya kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	41	Dok	4	0	0	0	4,0	9,76	sayXVr3EZ	0	151	2,65	49.509.808.771	16.624.026.914	33,58	-23,82	Asistem Adum
4.01.01.2.01	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	%	43	21	0	0	64,3	64,29	sayXVr3EZ	91,89	100	64,29	545.786.500	254.571.100	46,64	17,64	Perkeu
01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	2	1	0	0	3,0	75,00	ayXVr3EZ0f	2	20	15,00	312.724.500	247.958.600	79,29	-4,29	Perkeu

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%			
D1.2.01.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	bkmO-xl3UC	1	5	20,00	19.872.000	4.812.500	24,22	75,78	Perkeu	
D1.2.01.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	14.918.000	1.800.000	12,07	-12,07	Perkeu		
D1.2.01.0004	Tersedianya Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	FssJJTZHiV	1	5	20,00	15.682.000	0	0,00	100,00	Perkeu	
D1.2.01.0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2	Dok	0	1	0	0	1,0	50,00	VVOHPTv4F	1	10	10,00	8.038.000	0	0,00	50,00	Perkeu	
D1.2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Lap	1	0	0	0	1,0	100,00	2f7VtJlvgM	5	5	20,00	124.632.000	0	0,00	100,00	Perkeu	
D1.2.01.0007	Terlaksananya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	1	1	0	0	2,0	50,00	TW 1 Tahun	1	20	10,00	49.920.000	0	0,00	50,00	Perkeu	
D1.2.01.0008	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Lap	0	1	0	0	1,0	100,00	8-sv883EC	1	5	20,00	0	0	-	-	Perkeu	
4.01.01.2.02	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	100	%	32	0	0	0	31,8	31,82	c5KXxjNd0	0	100	31,82	17.568.998.061	7.232.183.175	41,16	-9,35	Perkeu	
D1.2.02.0001	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan Penerimaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	3	3	0	0	6,0	50,00	zzKBBiLMus	0	60	10,00	16.251.286.061	6.859.437.175	42,21	7,79	Perkeu	
D1.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	1.360.000	0	0,00	0,00	Perkeu		
D1.2.02.0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	P1Ca7YeAU	1	5	20,00	643.538.000	306.480.000	47,62	52,38	Perkeu	
D1.2.02.0004	Tersedianya Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	29.440.000	0	0,00	0,00	Perkeu		
D1.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	0	0	0	1,0	100,00	jiBEECKJC	1	5	20,00	17.224.000	0	0,00	100,00	Perkeu	
D1.2.02.0006	Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1	Dok	0	1	0	0	1,0	100,00	proses	1	5	20,00	604.450.000	63.588.000	10,52	89,48	Perkeu	
D1.2.02.0007	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Lap	1	1	0	0	2,0	50,00	zzKBBiLMus	4	20	10,00	17.706.000	2.678.000	15,12	34,88	Perkeu	
D1.2.02.0008	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	RHycQOu7U	1	5	20,00	3.994.000	0	0,00	100,00	Perkeu	
4.01.01.2.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan1	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	100	0	0	0	100,0	105,26	bayXVr3E20	100	95	105,26	507.465.400	173.675.200	34,22	71,04	Umum	
D1.2.03.0001	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	AzJpWw4fp	1	5	20,00	20.880.000	5.855.000	28,04	71,96	Umum	
D1.2.03.0002	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	pwWM1Qxv	1	5	20,00	14.600.000	2.479.000	16,98	83,02	Umum	
D1.2.03.0003	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	98.698.300	6.035.500	6,12	93,88	Umum	
D1.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	22.975.000	8.700.000	37,87	62,13	Umum	
D1.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	350.312.100	150.605.700	42,99	57,01	Umum	
4.01.01.2.05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	90	%	81	0	0	0	80,8	89,76	Tidak Ada	0	90	89,76	2.603.308.589	1.536.379.544	59,02	30,74	Umum	
D1.2.05.0001	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	Tidak Ada	12	60	10,00	120.400.000	36.000.000	29,90	20,10	Umum	
D1.2.05.0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	150.000.000	0	0,00	0,00	Umum		
D1.2.05.0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Bln	3	3	0	0	6,0	50,00	Tidak Ada	12	60	10,00	2.159.551.589	1.500.379.544	69,48	-19,48	Umum	
D1.2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bln	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	60	0,00	56.165.000	0	0,00	0,00	Umum	
D1.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Bln	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	60	0,00	14.520.000	0	0,00	0,00	Umum	

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
01.2.05.0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	0	0	0	0	0,0	0,00	-	10	50	0,00	102.672.000	0	0,00	0,00	Umum
4.01.01.2.06	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	100	0,00	11.765.962.780	2.536.560.405	21,56	-21,56	Umum
01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	1	0	0	1,0	100,00	Z fwDRVx	1	5	20,00	4.225.096.350	0	0,00	100,00	Umum
01.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	194.337.500	0	0,00	0,00	Umum
01.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	211.014.000	0	0,00	0,00	Umum
01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1,3	5	0,00	137.530.000	0	0,00	0,00	Umum
01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1,13	5	0,00	133.011.180	0	0,00	0,00	Umum
01.2.06.0008	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	tunjunga	2	5	0	0	7,0	23,33	7hipHR9na	30	150	4,67	1.619.138.000	779.875.000	48,17	-24,83	Umum
01.2.06.0009	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	Laporan	4	6	0	0	10,0	0,67	nP_Zpww8y	0	7500	0,13	5.074.145.750	1.727.643.405	34,05	-33,38	Umum
01.2.06.0010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	171.690.000	29.042.000	16,92	83,08	Umum
4.01.01.2.07	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	100	0,00	3.559.424.000	0	0,00	0,00	Umum
01.2.07.0002	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	19	0,00	3.320.010.000	0	0,00	0,00	Umum
01.2.07.0005	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	0	0	0	0	0,0	0,00	-	650	3250	0,00	239.414.000	0	0,00	0,00	Umum
4.01.01.2.08	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	100	0,00	3.665.441.000	1.105.986.339	30,17	-30,17	Umum
01.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	RD9zyqbfV0	0	20224	0,03	44.714.000	18.120.000	40,52	9,48	Umum
01.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	aK0lwZuvsC	0	60	10,00	1.505.000.000	633.918.200	42,12	7,88	Umum
01.2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	0	5	0	0	5,0	41,67	K02PHml_J	0	36	13,89	794.515.000	289.300.000	36,41	5,25	Umum
01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	0	3	0	0	3,0	25,00	YbwPiWiWc	0	60	5,00	1.321.212.000	164.648.139	12,46	12,54	Umum
4.01.01.2.09	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	%	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	100	0,00	1.840.994.945	216.492.874	11,76	-11,76	Umum
01.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	3	0	0	0	3,0	8,82	4vFDzchbl	34	191	1,57	881.544.945	30.654.460	3,48	5,35	UMUM
01.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	3	2	0	0	5,0	45,45	MAAnPop-Bp	11	55	9,09	584.200.000	164.684.700	28,19	17,26	UMUM
01.2.09.0009	Terpenuhnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0	1	0	0	1,0	50,00	-	2	10	10,00	375.250.000	21.153.714	5,64	44,36	UMUM
4.01.01.2.11	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	100	%	25	25	0	0	50,0	50,00	-	0	100	50,00	950.447.000	352.517.698	37,09	12,91	UMUM
01.2.11.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	XPDC7MY	0	60	10,00	480.231.000	152.537.698	31,76	18,24	UMUM
01.2.11.0003	Terlaksananya kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Layanan	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	30	0,00	66.500.000	0	0,00	0,00	UMUM
01.2.11.0004	Tersedianya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	DCIqKak6zif	0	20	30,00	403.716.000	199.980.000	49,53	0,47	UMUM
4.01.01.2.13	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	2	PD	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	3	0,00	595.519.000	138.036.574	23,18	23,09	ORGANISASI
01.2.13.ind2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	1	0,00					ORGANISASI
01.2.13.ind3		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	10	PD	6	6	0	0	12,0	120,00	eDRJoJK7Iz	7	50	24,00					ORGANISASI
01.2.13.ind4		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8	PD	6	6	0	0	6,0	75,00	JL_8QeBr3a	6	8	75,00					ORGANISASI
01.2.13.ind5		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	22	PD	0	8	0	0	8,0	36,36	9XNIGfzcnT	20	26	30,77					ORGANISASI
01.2.13.0001	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	ccqB_LNgIU	0	1	0,00					ORGANISASI
13.0001.ind2	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitas Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan	50	PD	10	7	0	0	17,0	34,00	T_Pipxw6z2	0	50	34,00	200.259.500	27.992.400	13,98	3,02	ORGANISASI

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
01.2.13.0002	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	27	PD	6	6	0	0	6,0	22,22	Ju67B73Lac	0	50	12,00	189.909.500	46.497.195	24,48	16,63	ORGANISASI
13.0002.ind2		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	10	PD	6	6	0	0	6,0	60,00	oO0HuF3EU	0	50	12,00					ORGANISASI
01.2.13.0003	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	PD	15	10	0	0	25,0	50,00	nXdDwZBiP	0	50	50,00	205.350.000	63.546.979	30,95	31,55	ORGANISASI
13.0003.ind2		Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	8	PD	6	6	0	0	6,0	75,00	MOgis48G2-	0	8	75,00					ORGANISASI
4.01.01.2.14	Meningkatnya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	81	%	27	18	0	0	45,5	56,12	4ItxASoQA	0	86	52,85					PROKOPIIM
01.2.14.ind2		Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	82	%	41	45	0	0	85,9	104,73	BIP9s No3	0	85	101,04	5.906.461.496	3.077.624.005	52,11	19,78	PROKOPIIM
01.2.14.ind3		Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	86	%	23	24	0	0	47,1	54,80	3zr7pFXP88	0	90	52,36					PROKOPIIM
01.2.14.0001	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110	Lyn	30	20	0	0	50,0	45,45	4ItxASoQA t	1	576	8,68	2.544.602.000	1.764.035.718	69,32	-23,87	PROKOPIIM
01.2.14.0002	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	85	Lyn	35	38	0	0	73,0	85,88	BIP9s No3k	1	448	16,29	1.629.416.000	664.083.287	40,76	45,13	PROKOPIIM
01.2.14.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	87	Lyn	20	21	0	0	41,0	47,13	3zr7pFXP88y	1	436	9,40	1.732.443.496	649.505.000	37,49	9,64	PROKOPIIM
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	84	Nilai	0	0	0	0	0,0	0,00	-	87,78	88	0,00	0	0	-	-	Perkeu
TOTAL/ RATA-RATA			TOTAL/ RATA-RATA						43,19				18,70	105.785.272.000	38.424.148.306	36,32	6,87		

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH>

<https://bit.ly/Pengukuran-Kinerja-SetdaKH>

Keterangan Warna:

Tidak Mencapai Target/ menjadi bahan evaluasi
 Melebihi Target

Tidak mencapai target (<90%). Capaian triwulan I minimal 15%, triwulan II minimal 40%, triwulan III minimal 65%, dan triwulan IV minimal 90% dan Maksimal 120%

Capaian Akhir RENSTRA pada Tahun 1 minimal 10%, Tahun 2 minimal 30%, Tahun 3 minimal 50%, Tahun 4 minimal 70% Tahun 5 minimal 90% dan Maksimal 120%

RENSTRA Tahun 1 10% (Triwulan I minimal 2%, Triwulan II minimal 4%, Triwulan III minimal 7% dan Triwulan IV minimal 10%)

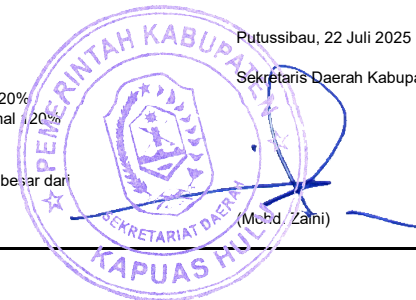
Target pada RENSTRA dapat dilihat pada link: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-30-SetdaKH-Excel>

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan. Dikatakan tidak efisien apabila persentase capaian keuangan lebih besar dari persentase capaian kinerja

Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja telah disepakati pada Ranhir RENSTRA 2025-2029

Putussibau, 22 Juli 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



(Mhd. Zahi)